



LAPORAN STUDI LAPANGAN KINERJA ORGANISASI

PADA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DISUSUN OLEH :

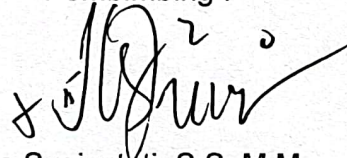
- KETUA : Dr. DIAN ARYOGO SUTOYO, M. Psi
WAKIL KETUA : SEPTA MARUS EKA PUTRA, S.H, M.H
SEKRETARIS : LYDIA GUSMALITA, S.STP, M.Ec. Dev
ANGGOTA : 1. ARYA DEWANTARA, S.E, M.Si
2. IMAM ILHAM, S.H, M.H
3. ALEXANDER, S.IP, M.Si
4. JUFRIANSYAH, S.STP, M.Si
5. DERRY ARIADI, S.H, M.H
6. FETRI ASWANTI, S.T, M.Si, M.
7. ARDHILES P. RAJA SIAHAAN, S.T
8. HENDRI WARDISON, S.P, M.Si
9. PUTRI DAMAYANTI, S.Psi, M.M
10. SRI ULFATI, S.H
11. BRAM ABRAHAM, S.E
12. NUR AINUN TANJUNG, S.AG

KELOMPOK II

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN III
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DI PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2023
LEMBAR PENGESAHAN
STUDI LAPANGAN KINERJA ORGANISASI
PADA BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

Bandung, Oktober 2023

Disetujui
Pembimbing I



Dra. Sugiastuti, S.S., M.M.
Widyaiswara Ahli Utama
NIP. 19630709 199003 2 006

Ketua Kelompok II



Dr. Dian Aryogo Sutoyo, M. Psi
NIP. 19761107 200312 1 007

Pembimbing II



Hj. Holijah, S.H., M.H
Widyaiswara Ahli Madya
NIP. 19690907 199603 2 004



MENGESAHKAN
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN



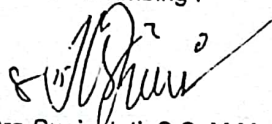
Prof. Dr. H.M. EDWAR JULIARTHA, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19750707 199703 1 003

**LEMBAR PERSETUJUAN
STUDI LAPANGAN KINERJA ORGANISASI**

**PADA BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

Bandung, Oktober 2023

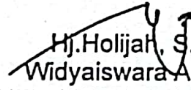
Disetujui
Pembimbing I


Dra. Sugiastuti, S.S., M.M.
Widyaiswara Ahli Utama
NIP. 19630709 199003 2 006

Ketua Kelompok II


Dr. Dian Aryogo Sutoyo, M. Psi
NIP. 19761107 200312 1 007

Pembimbing II


Hj. Holijah, S.H., M.H
Widyaiswara Ahli Madya
NIP. 19690907 199603 2 004

MENGETAHUI DAN MENYETUJUI


Analisis Kebijakan Madya
Biro Organisasi Setda Prov. Jabar

Dr. Purnomo Yustianto, S.T., M.T
Pembina Tk. I/IVb
NIP. 19720528 200501 1 004

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah senantiasa selalu kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga bisa menyelesaikan tugas Studi Lapangan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan baik dan lancar, dalam rangka memenuhi tugas Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan hasil Studi Lapangan (STULA) ini semoga bisa memberikan manfaat bagi peserta pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Banyak hasil positif yang dapat kita peroleh dan bisa diadopsi dalam peningkatan pelayanan pada instansi kita masing-masing.

Tidak lupa juga kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak/Ibu Widhyaiswara yang telah memberikan bimbingan kepada kami dalam merencanakan, melaksanakan dan menyusun Laporan Studi Lapangan dan tugas-tugas lainnya.
2. Ibu Hj. Holijah, S.H., M.H sebagai pendamping selama melaksanakan Studi Lapangan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Bapak Penjabat Gubernur Jawa Barat yang telah memberikan ijin kepada kami untuk mengadakan Studi Lapangan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4. Bapak Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta staf yang telah memberikan penjelasan dan gambaran tentang Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
5. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan Studi Lapangan ini sehingga selesai tepat pada waktunya.

Semoga segala bantuan dan dukungan yang diberikan kepada kami, mendapat imbalan yang berlipat dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa dan hasil studi lapangan ini dapat memberikan inspirasi kepada kita semua dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Bandung, Oktober 2023
Kelompok 2 Stula PKA Angkatan
III BPSDMD Pemprov Sumsel

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	1
LEMBAR PENGESAHAN.....	2
LEMBAR PERSETUJUAN.....	3
KATA PENGANTAR.....	4
DAFTAR ISI.....	6
BAB I : HASIL STUDI LAPANGAN.....	6
A. Profil Instansi Penyelenggara Layanan Publik.....	6
B. Deskripsi Kinerja Organisasi Pelayanan Publik.....	12
C. Keunggulan (<i>Key Succes Factor</i>) Keunggulan strategi dan Manajemen Kinerja Pelayanan Publik.....	15
D. Keberlangsungan keunggulan strategi dan manajemen kinerja pelayanan publik.....	16
E. <i>Lesson Learnt</i> Hasil Studi Lapangan.....	18
1 Peran Kepemimpinan.....	18
2 Inovasi Pelayanan.....	20
3 Kompetensi dan Pemberdayaan SDM.....	21
4 Pembangunan Jejaring dan Kolaborasi Pemangku Kepentingan.....	22
5 Manajemen Kinerja.....	23
6 Manajemen Resiko.....	24
7 Planning and Budgeting.....	26
8 PemanfaatanTeknologi informasi.....	27
BAB II : PENUTUP.....	29
DAFTAR PUSTAKA	30
LAMPIRAN.....	31

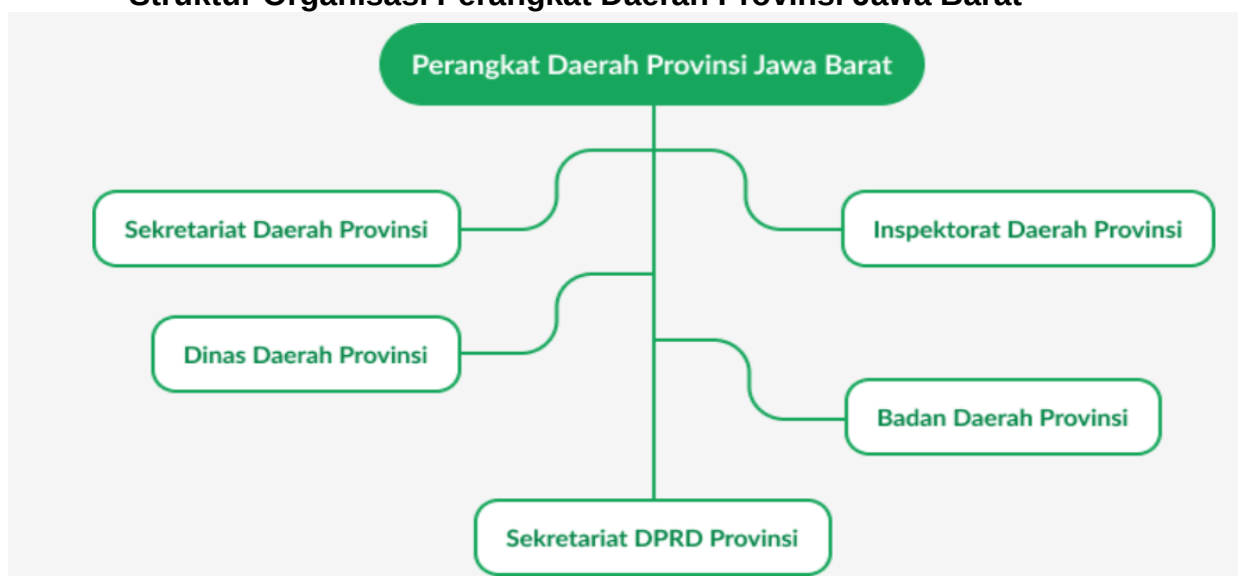
BAB I HASIL STUDI LAPANGAN

A. Profil Instansi Penyelenggara Pelayanan Publik

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Daerah Jawa Barat merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di awal berdirinya, Daerah Jawa Barat ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat yang meliputi wilayah Keresidenan Banten, Bogor, Jakarta, Priangan, dan Cirebon. Dalam perjalanannya, Provinsi Jawa Barat telah mengalami dua kali pemekaran melalui pembentukan DKI Jakarta dan Provinsi Banten. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 82 tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat

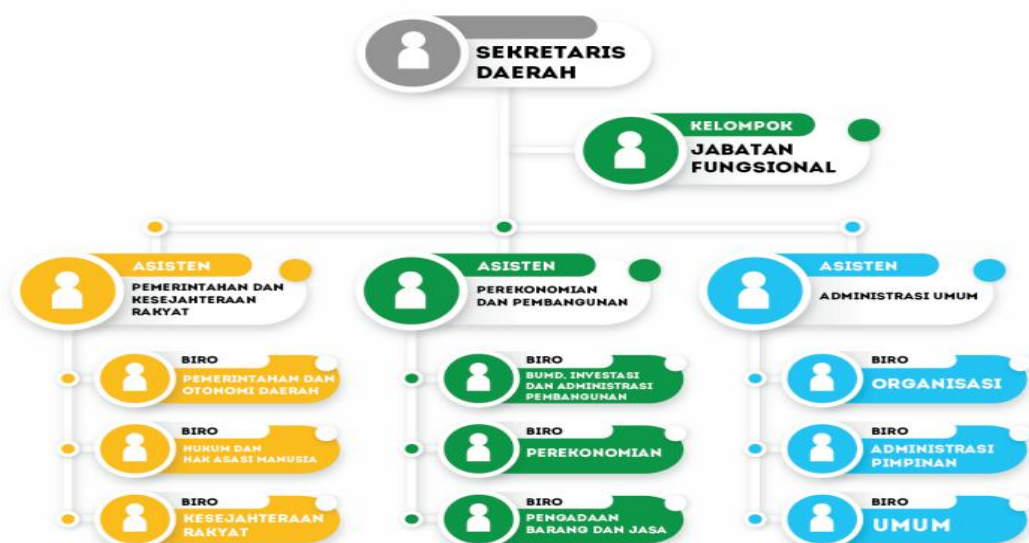


Sumber: Portal Jabar.go.id

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, tugas pokok Sekretariat Daerah adalah merumuskan kebijakan umum Pemerintah Daerah Provinsi dan pengkoordinasian administratif, membina, mengendalikan dan memfasilitasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Selanjutnya Ayat (2) menguraikan fungsi Sekretariat Daerah adalah pada:

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah Provinsi;
2. penyelenggaraan koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi oleh Perangkat Daerah;
3. penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi oleh Perangkat Daerah;
4. penyelenggaraan administrasi Sekretariat Daerah Provinsi;
5. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah Provinsi; dan
6. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat



Sumber: Renstra Setda Pemprov. Jawa Barat

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang luas dan kompleks tersebut, Sekretariat Daerah didukung oleh 3 (tiga) unit eselon I.b yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan umum, koordinasi, dan supervise perangkat daerah sesuai dengan ruang lingkup Asisten, serta 9 (sembilan) Unit Eselon II.a yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administrative dalam bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
2. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administratif dalam bidang hukum dan hak asasi manusia, meliputi perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta dokumentasi hukum, pembinaan dan pengawasan produk hukum yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
3. Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administratif dalam bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
4. Biro Perekonomian mempunyai tugas mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administrative dalam bidang perekonomian, meliputi sumber daya alam, ketahanan pangan dan pertanian, serta sarana perekonomian yang menjadi kewenangan Provinsi;
5. Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi dan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administrative dalam bidang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),

- investasi daerah dan administrasi pembangunan, meliputi BUMD Lembaga keuangan, Badan Layanan Umum Daerah, BUMD non lembaga keuangan, investasi daerah dan administrasi pembangunan;
6. Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administrative dalam bidang pengadaan Barang dan Jasa, meliputi pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan;
 7. Biro Organisasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administrative dalam bidang organisasi, meliputi kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja serta tatalaksana yang menjadi kewenangan Provinsi;
 8. Biro Administrasi Pimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administratif dalam bidang administrasi pimpinan, meliputi rumah tangga, materi dan komunikasi pimpinan serta keprotokolan;
 9. Biro Umum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dalam hal penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan asset dalam hal pemberian pelayanan pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja, serta bidang tata usaha dalam hal mengkoordinasikan pelaksanaan ketatausahaan pada lingkup Sekretariat Daerah.

2. Sumber Daya Manusia

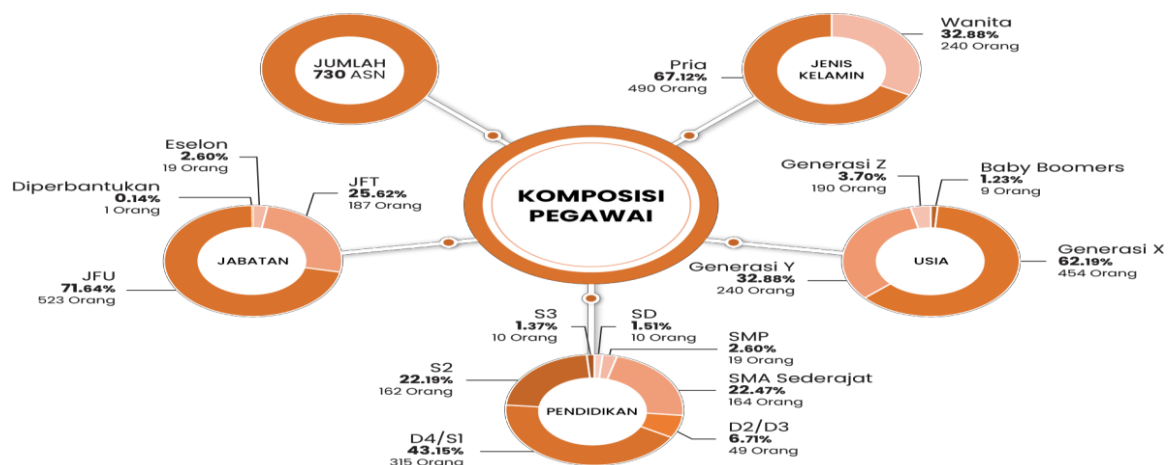
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan organisasi. Apabila di dalam organisasi sudah memiliki modal besar dan teknologi canggih namun tidak ada SDM yang dapat mengelola dan memanfaatkannya maka tidak akan mungkin dapat meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh sebab itu, pentingnya peran SDM dalam organisasi itu

sangat diperlukan sebagai unsur utama dan unsur pengendali keberhasilan organisasi.

Berdasarkan data kepegawaian s.d. bulan Desember 2022, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat (Setda Jabar) memiliki pegawai sebanyak 1.264 orang dengan komposisi 702 PNS, 28 CPNS dan 534 Non ASN. Dari sisi kualitas, potensi PNS pada Setda Jabar cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari komposisi latar belakang pendidikan dengan mayoritas pegawai merupakan Sarjana (36,58%) dan bergolongan ruang III (62,47%), sedangkan apabila dilihat dari komposisi usia, mayoritas berada pada rentang usia 41-50 tahun (39,86%). Komposisi tersebut menggambarkan mayoritas PNS pada Setda Jabar memiliki pendidikan Sarjana atau memiliki pengalaman bekerja yang cukup lama. Keduanya, memiliki kontribusi positif terhadap ketercapaian kinerja unit organisasi.

Namun demikian, Setda Jabar memiliki komposisi PNS dengan pendidikan D-III sebanyak 48 pegawai (6,58%). Jumlah tersebut lebih rendah dari pegawai berpendidikan SLTA sederajat sebanyak 157 pegawai (21,51%). Selain itu, Setda Jabar memiliki Non ASN untuk mendukung kelancaran dan efektivitas kinerja PNS. Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Administrasi Pimpinan dan Biro Umum memiliki jumlah Non PNS yang cukup besar bila dibandingkan dengan Biro yang lain

Gambar 1.3.
Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah



Sumber: Renstra Setda Pemprov Jawa Barat

3. Sumber Daya Anggaran

Secara umum, selama tiga tahun terakhir, Setda Jabar mampu mengelola rata-rata 94,11% alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Selama kurun waktu tahun 2020 s.d. tahun 2022, penetapan alokasi anggaran terus meningkat. Sedangkan dari sisi penggunaan anggaran ada sedikit penurunan persentase capaian di tahun 2021 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 capaian penggunaan anggaran sebesar 95,39%, tahun 2021 sebesar 91,50% dan tertinggi pada tahun 2022 dengan capaian 95,45%.

Gambar 1.4
Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah



Sumber: LKPJ Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat TA 2020-2022

4. Sarana dan Prasarana

Sarana Prasarana Setda Jabar meliputi tanah, bangunan, alat penyimpan data, logistik, alat keamanan dan alat transportasi. Tanah dan bangunan milik Setda Jabar tidak hanya berlokasi di Gedung Sate, namun juga di lokasi lain yang digunakan sebagai bangunan kantor, rumah negara, rumah dinas, gudang, tempat ibadah, maupun tanah kosong yang dapat dipergunakan oleh publik.

Gambar 1.5.
Jenis Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah



Sumber: Renstra Setda Pemprov Jawa Barat

B. Deskripsi Kinerja Organisasi Pelayanan Publik

Peran Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi adalah pada perumusan kebijakan umum daerah provinsi. Peran ini, memberikan kontribusi optimal pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang menjadi salah satu tujuan pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Kontribusi peran ini tergambarkan dalam pencapaian kinerja Sekretariat Daerah yang sangat baik melalui pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi dengan proyeksi tahun 2022 terealisasi pada predikat A.

Gambar 1.6
Core Business Sekretariat Daerah



Sumber: Renstra Setda Pemprov Jawa Barat

Secara umum, sasaran strategis mengarah pada dua klasifikasi yaitu pada pemastian kualitas kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat serta pada pelaksanaan implementasi kebijakan. Pada pemastian kualitas kebijakan, sasaran strategis ditetapkan dengan kalimat ***‘Meningkatnya Kualitas Kebijakan’***. Sasaran ini difokuskan pada kebijakan yang memiliki dampak terhadap masyarakat terutama dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Sehingga tolok ukur pencapaiannya diamanatkan kepada tiga biro yaitu Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Perekonomian, serta Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan.

Secara teknis, kinerja ketiga Biro tersebut adalah untuk memastikan bahwa proses perumusan kebijakan dari mulai perencanaan hingga evaluasi dipenuhi dan dipatuhi. Adapun pengukuran didasari pada perhitungan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI).

Kemudian, pada pemastian implementasi kebijakan dilakukan dengan menetapkan empat sasaran, antara lain:

1. meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan yang ditetapkan sebagai dukungan pencapaian sasaran pembangunan Jawa Barat yaitu ***‘Terwujudnya Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Smart, Bersih, Dan Akuntabel’*** dan merupakan penerapan dari kebijakan terkait reformasi birokrasi. Adapun pencapaiannya diamanatkan kepada lima biro yaitu Biro Hukum dan HAM, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, serta Biro Organisasi. Pengukuran yang menjadi tolok ukur pencapaiannya didasarkan pada perhitungan evaluasi penerapan reformasi birokrasi di delapan area perubahan sebagaimana dilakukan oleh Kementerian PAN & RB;
2. meningkatnya kualitas pembinaan, pemahaman pengamalan keagamaan yang ditetapkan sebagai dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan Jawa Barat yaitu ***‘Meningkatnya Keimanan Dan Kerukunan Umat Beragama Dalam Kerangka Demokrasi’***. Kinerja ini merupakan implementasi dari kebijakan terkait kebebasan beragama dan kerukunan umat beragama. Adapun pencapaiannya, diamanatkan

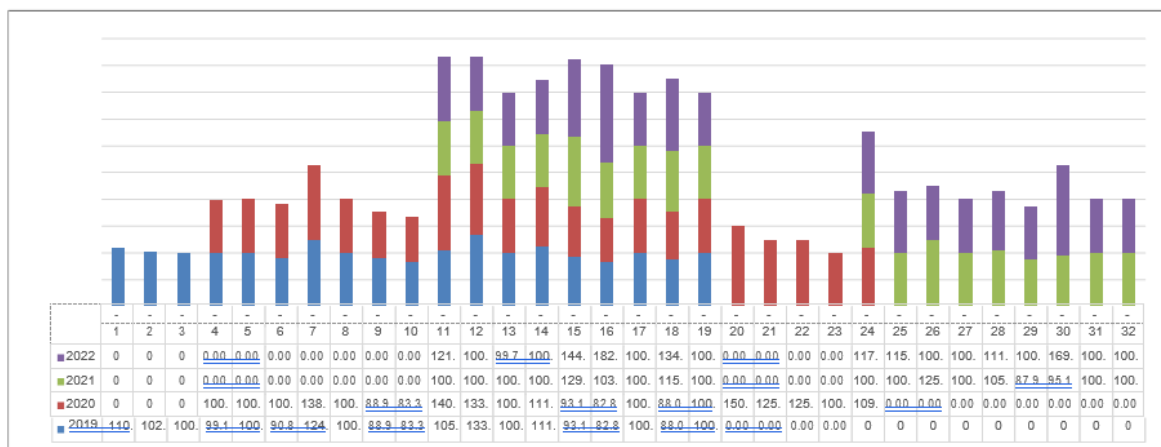
hanya kepada Biro Kesejahteraan Rakyat yang mengampu fungsi pembinaan bidang keagamaan;

3. diusulkannya calon daerah otonomi baru yang merupakan kinerja pendukung terhadap pencapaian sasaran pembangunan Jawa Barat yaitu ***‘Terbentuknya Daerah Otonomi Baru Untuk Pemerataan Pembangunan’***. Kinerja ini merupakan implementasi kebijakan pimpinan dalam pemekaran wilayah untuk menjamin terjadinya pembangunan yang merata di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Pencapaiannya diamanatkan kepada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan pengukuran didasarkan kepada kebijakan yang mengatur syarat pemekaran wilayah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000;
4. meningkatnya kolaborasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kinerja pendukung terhadap pencapaian sasaran pembangunan ***‘Terwujudnya Kolaborasi Antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota Dan Pihak Lainnya Dalam Pembangunan Yang Sinergis Dan Integratif’***. Ini pun merupakan implementasi terhadap kebijakan pimpinan yang menekankan urgensi kolaborasi untuk pembangunan yang efektif dan efisien. Pencapaian sasaran ini diamanatkan hanya kepada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan pengukuran didasarkan kepada kebijakan yang mengatur tentang efektifitas kerjasama daerah;

meningkatnya kualitas layanan sekretariat daerah yang merupakan implementasi dari kebijakan tugas pokok dan fungsi untuk memastikan kinerja setda berjalan secara optimal. Kinerja ini merupakan kinerja pendukung bagi pencapaian sasaran setda yang lainnya. Adapun pencapaiannya diamanatkan kepada Biro Administrasi Pimpinan dan Biro Umum dengan pengukuran melalui survey kepuasan.

Secara rata-rata kinerja Setda Jabar dalam empat tahun terakhir menunjukkan kondisi yang memuaskan dengan capaian sebesar 103,5%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Diagram 1.1
Capaian Indikator Kinerja Setda Prov Jabar Tahun 2019-2022



Sumber: Renstra Setda Pemprov Jawa Barat

C. Keunggulan (*Key Succes Factors*) Strategi Dan Manajemen Kinerja Pelayanan Publik

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mengembangkan inovasi pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerjanya. Adapun *Key Succes Factors* tersebut antara lain:

a. Komitmen tinggi dari seluruh stakeholder

Hal pertama yang menjadi faktor kunci keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan publik di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah adanya komitmen yang tinggi dari seluruh stakeholder. Komitmen tinggi pimpinan dan seluruh jajaran pemerintah dan pentahelix untuk memajukan provinsi Jawa Barat tercermin dari penandatanganan deklarasi/ *MoU*.

b. Kepemimpinan transformasional dan inovatif

Beberapa tahun terakhir, Provinsi Jawa Barat telah melahirkan berbagai inovasi. Gubernur Jawa Barat terus mendorong Bupati dan Wali Kota agar terus berinovasi dalam pelayanan kepada Masyarakat. Setiap tahunnya digelar Kompetensi Inovasi Jawa Barat (KIJB), yang akan menyaring inovasi. Inovasi yang menjadi pemenang KIJB wajib direplikasi Pemda Kabupaten/Kota di Jabar sebagai solusi dalam memecahkan permasalahan dan meningkatkan pelayanan publik.

c. Pembangunan Jejaring Kerja dan Kolaborasi Pemangku Kepentingan
 Dalam bekerja harus menguatkan kerjasama, setiap OPD wajib meninggalkan ego OPD masing-masing serta memperkuat hubungan dan keterlibatan stakeholders. Kolaborasi *pentahelix* mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergi dan integrative.

d. Pemanfaatan Teknologi Digital

Provinsi Jawa Barat selalu berusaha menyelesaikan permasalahan dan menekan efektifitas dan efisiensi dengan mengembangkan budaya inovasi. Aspek peningkatan pelayanan publik di Provinsi Jawa Barat meraih predikat kepatuhan tertinggi standar pelayanan publik tahun 2022 berdasarkan penilaian ombudsman. Budaya inovasi terus digiatkan baik inovasi digital maupun inovasi non-digital untuk mencapai birokrasi berkelas dunia dan pelayanan publik yang tinggi. Pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci pembangunan *smart city* dan SPBE. Teknologi digital dimanfaatkan agar pelayanan lebih mudah diakses oleh masyarakat dan Kegiatan yang dilaksanakan OPD tidak bersifat formalitas, tapi harus berdampak untuk lebih baik dalam melayani masyarakat dengan baik.

D. Keberlangsungan Keunggulan Strategi Dan Manajemen Kinerja Pelayanan Publik

Pengukuran terhadap Tingkat Capaian Kinerja Biro Organisasi SETDA Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Target Pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Biro Organisasi SETDA Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Biro Organisasi SETDA Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Capaian Aspek/Indikator Kinerja Biro Organisasi

No	Aspek/Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai Penguatan Organisasi	Nilai	2.08	2.08	N/A	N/A	N/A	1.85	1.85	N/A	N/A	

No	Aspek/Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
2	Nilai Penataan Organisasi	Nilai	2.22	2.22	N/A	N/A	N/A	1.85	1.85	N/A	N/A	
3	Nilai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	4.1	4.1	4.06	4.18	4.3	3.82	3.82	5.26	6.23*	
4	Nilai Penataan Tata Laksana	Nilai	3.62	3.62	3.2	3.3	3.4	3	3	3.31	6.2*	
5	Kategori Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Jawa Barat	Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A*	
6	Nilai Manajemen Perubahan	Nilai	3.69	3.69	3.45	3.55	3.65	3.25	3.25	3.97	4.92*	
7	Nilai Penataan dan Penguatan Organisasi	Nilai	N/A	N/A	3.94	4.06	4.18	N/A	N/A	3.75	7.09*	

Bisa dilihat dari tabel di atas bahwa kinerja Biro Organisasi Setda Pemprov Jawa Barat setiap tahun terus meningkat. Tahun 2022 biro Organisasi Setda Pemprov Jabar dapat mencapai semua target yang ditetapkan.

Capaian kinerja indikator tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya penerapan kebijakan pelayanan publik. Faktor yang mempengaruhi terwujudnya kondisi tersebut adalah :

- Proses bisnis pelayanan publik perangkat daerah yang sederhana melalui upaya penyusunan probis pelayanan publik perangkat daerah termasuk penyusunan database jenis layanan publiknya.
- Evaluasi kebijakan pelayanan publik yang mendorong kualitas pelayanan publik melalui upaya pelaksanaan forum konsultasi publik.
- Pembangunan aplikasi survey kepuasan masyarakat terintegrasi.
- Evaluasi standar pelayanan di perangkat daerah dan kabupaten/kota.
- Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap standar pelayanan melalui penyusunan Pergub pedoman penyusunan

standar pelayanan dan pelaksanaan sosialisasinya kepada perangkat daerah.

E. Lesson Learnt Hasil Studi Lapangan

1. Peran Kepemimpinan

Salah satu faktor keberhasilan perubahan di Provinsi Jawa Barat adalah “Komitmen Pimpinan”. Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah berkomitmen penuh dengan cara memberikan dukungan pada setiap perubahan dalam upaya pencapaian tujuan. Salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui reformasi sektor publik dengan tahapan antara lain; perubahan pada Sumber Daya Aparatur, Kelembagaan (organisasi) dan ketata laksanaan (proses bisnis). Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa barat memiliki pemimpin yang berkomitmen kuat untuk mengimplementasikan Integritas dan memaksimalkan budaya organisasinya.

Selanjutnya Penguatan budaya kerja yang dikehendaki untuk pemberdayaan SDM pegawai dapat diperoleh melalui tahap perumusan nilai (*core value*), implementasi budaya kerja serta tahap monitoring dan evaluasi.

Hasil studi lapangan memperlihatkan bahwa, aparatur Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menerapkan nilai-nilai budaya kerja secara umum dalam kategori baik. Hal ini tidak terlepas dari Pola kepemimpinan transformasional Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat. Berikut ini beberapa implementasi pola kepemimpinan transformasional yang diterapkan:

a. Mendorong kreativitas dan budaya inovasi:

Pemimpin transformasional selalu berupaya untuk mendorong kreativitas dan inovasi unit kerjanya. Untuk menjamin keberlangsungan kreativitas dan inovasi tersebut, maka Gubernur Jawa Barat membuat satu tekad bersama untuk membangun Jawa Barat Bersama dengan menumbuhkan budaya inovasi. Menindaklanjuti tekad bersama ini, Biro Organisasi Setda Jawa Barat juga melakukan upaya-upaya untuk mendorong inovasi

seperti membuat inovasi untuk memaksimalkan efektifitas dan efisiensi kinerja.

b. Menciptakan lingkungan kerja yang dinamis

Lingkungan kerja yang dinamis dapat meningkatkan produktifitas kerja. Manfaat dari lingkungan kerja yang dinamis antara lain:

- a. Meningkatkan hubungan kerja antar karyawan
- b. Mengurangi resiko stress
- c. Membentuk suasana yang nyaman
- d. Meningkatkan mood kerja pegawai

Biro Organisasi berusaha menciptakan lingkungan kerja dinamis dengan membuat ruang kerja yang nyaman. Tersedia ruang pertemuan dan ruang kerja dengan konsep semi café, tersedia pantry, dan alat permainan untuk mengisi waktu senggang pegawai. Masing masing pegawai tidak memiliki meja kerja pribadi, untuk peralatan pribadi disediakan loker penyimpanan.

c. Mekanisme Kerja Dinamis

Provinsi Jawa Barat mengimplementasikan kebijakan Mekanisme Kerja Dinamis (MKD). Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 102 tahun 2022 dan Perpres 21 tahun 2023 tentang hari kerja dan jam kerja instansi pemerintah pegawai Aparatur Sipil Negara. MKD juga sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) tentang menciptakan "*Work Life Balance*" dan arahan Gubernur Jawa Barat tentang pelaksanaan *work from home (WFH)*.

Mekanisme Kerja Dinamis adalah sebuah kebijakan dimana ASN dapat bekerja di mana saja dengan output dan outcome terukur yang sudah disepakati sebagai target kerjanya. Melalui penerapan MKD, ASN dapat memilih waktu kerja secara kustom, kapan dan di mana saja selagi mendapat persetujuan dari pimpinan dan syarat yang ditentukan. Sistem untuk mekanisme kerja dinamis ini memakai aplikasi kepegawaian Tunjangan Remunerasi Kinerja

(TRK) dan aplikasi K-Mob. MKD berorientasi output dan outcome. MKD menghasilkan kinerja yang lebih efisien dimana setiap individu melaksanakan kinerja sesuai dengan indikator capaian individu yang terintegrasi dengan Indikator kinerja Perangkat Daerah masing masing. MKD memberikan manfaat efisiensi anggaran seperti hemat bahan bakar minyak (BBM), biaya makan, dan menciptakan birokrasi yang agile (lincah).

d. Mengembangkan Jaringan dan Kolaborasi

Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat terus mengembangkan jaringan dan kolaborasi *Pentahelixnya*, antara lain:

- a. Komunitas.
- b. Akademisi
- c. Media Massa
- d. Bisnis
- e. Masyarakat
- f. Pemerintah

2. Inovasi Layanan

Biro organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat mendukung pelaksanaan Pembangunan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan. Biro organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat terkenal dengan slogan ***"Innovation and Growth For A Fundamental Shift"***. Inovasi unggulan pada Biro Setda Provinsi Jawa Barat diantaranya adalah:

- a. *Sidebar Mobile Apps* adalah aplikasi tata kelola persuratan berbasis elektronik yang efektif, digunakan oleh seluruh jenjang aparatur di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat berbasis web dan apps yang tersedia di *playstore* maupun *appstore*.
- b. *Tunjangan Remunerasi Kinerja (TRK)* adalah aplikasi e-kinerja ASN sesuai dengan capaian kinerja individu sesuai dengan Capaian Kinerja Perangkat Daerah masing masing ASN

- c. *Aplikasi KMOB* adalah aplikasi Kehadiran *MOBiLe*
- d. Aplikasi Surabi (Sistem Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Terintegrasi) merupakan system informasi untuk mempermudah pelaksanaan evaluasi implementasi RB yang dilengkapi dengan petunjuk teknis.
- e. Portal Jabarprov adalah Portal yang menyediakan informasi resmi, akses ke berbagai layanan publik dan tempat menyampaikan aspirasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- f. Japati (Jawa Barat Managemen Kinerja Instansi Pemerintahan Terintegrasi) merupakan aplikasi e-sakip yang menyediakan informasi manajemen kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sesuai dengan implementasi pengelolaan kinerja organisasi, cascading kinerja dilakukan secara berjenjang dengan masing masing pengampu dari level ultimate outcome, intermediate outcome, immediate outcome sampai denagn level output. Japati bisa diakses bukan hanya oleh perangkat daerah tetapi juga masyarakat agar dapat memberikan masukan terhadap kinerja pemerintah.

3. **Kompetensi dan Pemberdayaan SDM**

Kompetensi dan pemberdayaan SDM (Sumber Daya Manusia) sangat penting untuk meningkatkan kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jabar. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penyederhanaan Birokrasi yakni melalui melakukan penyederhanaan struktur organisasi pada Fase 1 yakni dari 345 Jabatan dan 343 pejabat yang disetarakan. Pada Fase 2 yakni 1.360 jumlah struktur yang disederhanakan dan 876 jumlah pejabat yang disetarakan. Sehingga total yakni 647 jabatan struktural sebesar 27,5 % dan 1.705 jabatan fungsional 72, 4%.
- b. Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Setda Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 181 Tahun 2021 tentang Manajemen Kinerja yang menerapkan pola team kerja yang bertanggung jawab langsung pada Pimpinan Level II

memberikan ruang yang besar bagi pegawai yang menjadi ketua team kerja (berasal dari JF/Pelaksana) dalam memberikan inovasi dan Pengembangan kompetensi.

- c. Pendefinisian peran perangkat daerah dimana sinergitas keterkaitan fungsi organisasi berdasarkan proses kinerja sehingga dapat melaksanakan pencapaian sasaran strategis organisasi. Sinergitas *Technostructure* yakni merger antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Support Staff yakni Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- d. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan Manajemen Talenta dengan melakukan inovasi SiM Jawa. SiM Jawa merupakan sistem informasi kepegawaian terintegrasi seputar karir pegawai yang berbasis meritokrasi. SiM Jawa sudah dijadikan pilot project oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) dalam penerapan manajemen talenta nasional. Dengan SiM Jawa, proses penempatan, rotasi, mutasi, dan promosi seorang aparatur sipil negara (ASN) menjadi lebih transparan dan berkualitas. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil menempati urutan pertama dengan skor 396,5 sebagai instansi pemerintah kategori sangat baik dalam mengimplementasikan system merit pada manajemen aparatur sipil negara penilaian Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam Anugerah Meritokrasi tahun 2022.

4. Sistem Kerja Aparatur Provinsi Jawa Barat

Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelayan publik mengimplementasikan pola kerja *Team of Teams (ToT's)* merupakan batas-batas individu dalam kelompok maupun kelompok dalam pemberian penugasan. Dari penentuan ini, tim yang diberikan penugasan dapat mengidentifikasi sejauh mana tim tersebut mendapatkan penugasan sesuai lingkup *agility*-nya.

Adapun model sistem kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Tim internal bidang, merupakan tim yang secara tetap mengerjakan

tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada bidang masing-masing.

2. Tim *agile* antar bidang, merupakan tim yang terdiri dari individu-individu dari berbagai bidang untuk mengerjakan penugasan pengembangan (*Improvement*)
3. Tim *agile* lintas perangkat daerah merupakan tim yang terdiri dari individu-individu dari beberapa perangkat daerah untuk mengerjakan penugasan khusus baik yang merupakan instruksi pimpinan maupun kegiatan pengembangan.
4. Tim *agile* lintas instansi merupakan tim yang terdiri dari individu-individu lintas instansi seperti, Pemprov Jabar dengan Kementerian Kehutanan dalam rangka menjalankan pekerjaan khusus yang bersifat kolaboratif antar instansi.

5. Manajemen Kinerja

Manajemen kinerja adalah cara untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari organisasi, tim, dan individu dengan memahami dan mengelola kinerja dalam kerangka kerja yang disepakati dari tujuan yang direncanakan dan berbagai persyaratan kompetensi yang ditentukan. Provinsi Jawa Barat berada diposisi ke-6 diantara Pemerintah Daerah se-Indonesia yang memperoleh Predikat A, meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan dimensi akuntabilitas kinerja dipengaruhi oleh meningkatnya pemanfaatan arsitektur kinerja dalam sinergitas manajemen kinerja, ketatalaksanaan dan kelembagaan, meningkatnya efektivitas pembinaan SAKIP Kabupaten/kota di Jawa Barat, dan tata kelola akuntabilitas kinerja mendorong peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja, pelaporan kinerja memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi atau kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Pada tahun 2021 hingga 2022, sebanyak 38 perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat sudah menerapkan konsep tersebut dalam perencanaan kinerjanya, yang kemudian menjadi pedoman manajemen kinerja terintegrasi institusi dengan individu. Pengintegrasian manajemen kinerja institusi dengan manajemen kinerja individu tersebut,

dilakukan melalui interoperabilitas aplikasi E-SAKIP dan TRK sehingga akan terlihat keterhubungan antara pencapaian kinerja institusi didukung dengan pencapaian kinerja individu.

Tahapan manajemen Kinerja Pemerintah Provinsi Jabar terdiri atas:

1. Manajemen Proses bisnis, tujuan dibuatnya bisnis proses adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang terstruktur dan terukur untuk mengelola dan meningkatkan efisiensi operasional serta kinerja organisasi secara keseluruhan.
2. Membangun arsitektur kinerja, yaitu kerangka logis kinerja sistematis mulai dari *ultimate outcome* sampai dengan output yang disusun berdasarkan permasalahan dan teori. Arsitektur kinerja membantu mengarahkan fokus organisasi pada tujuan yang ingin dicapai. Dengan menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur, organisasi dapat memahami apa yang penting dan berfokus pada pencapaian yang diinginkan.
3. Menyusun *cascading* kinerja berupa arsitektur kinerja yang disesuaikan dengan dokumen perencanaan.
4. Menyusun *crosscutting* kinerja lintas berupa kinerja lintas fungsi dalam arsitektur kinerja dan *cascading*.

6. Manajemen Resiko

Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam suatu organisasi atau proyek. Tujuan utama manajemen risiko adalah mengurangi atau meminimalkan dampak negatif dari risiko dan memaksimalkan peluang yang ada.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), secara garis besar menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menerapkan SPIP, salah satu unsur SPIP mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk melakukan penilaian risiko (*risk assessment*) dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.964-Inspt/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Daerah Provinsi Jawa Barat. Dalam rangka pengendalian dan pengawasan pengendalian terhadap penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Provinsi Jawa Barat perlu ditetapkan struktur Manajemen Risiko. Struktur Manajemen Risiko terdiri dari:

- a. Komite Manajemen Risiko Provinsi Jawa Barat, yang melakukan pengendalian tingkat kebijakan Provinsi Jawa Barat;
- b. Kepala Perangkat Daerah, yang melakukan pengendalian tingkat operasional;
- c. Inspektorat Provinsi Jawa Barat sebagai Unit Kepatuhan Manajemen Risiko (*Compliance Office for Risk Management*), yang melakukan pengawasan atas pengendalian terhadap penerapan Manajemen Risiko.

Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa barat membuat Komite Manajemen Resiko Provinsi Jawa Barat, komite ini terdiri dari, :

- a. Komite Eksekutif
 - 1) Gubernur selaku Ketua
 - 2) Wakil Gubernur selaku Wakil Ketua
 - 3) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat dan Ketua Komite Pelaksana Selaku Anggota
- b. Komite Pelaksana
 - 1) Kepala Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat selaku Ketua
 - 2) Kepala Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat selaku Wakil Ketua
 - 3) Para Kepala Perangkat Daerah yang terkait Selaku Anggota
- c. Biro/Bagian, pada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat yang menangani urusan yang terkait dengan Administrasi Pembangunan selaku Sekretariat Komite Manajemen Risiko.

7. Planning and Budgeting

Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat melaksanakan 8 program, 28 kegiatan dan 86 sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 98 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 155 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 98 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Jawa Barat menunjukkan adanya pengurangan pada belanja pada struktur anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sehingga menjadi total **Rp1.057.589.572.097,00**.

Tabel I.2
Anggaran pada Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat

NO	PROGRAM	PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Program Kesejahteraan Rakyat	Rp570.571.594.939,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
2	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rp 27.246.455.683,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
3	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp6.333.035.170,00	Biro Hukum dan HAM
4	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp7.507.113.830,00	Biro Perekonomian, Biro BUMD, Investasi dan Adbang
5	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp797.888.680,00	Biro BUMD, Investasi dan Adbang

NO	PROGRAM	PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
6	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp4.084.984.700,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
7	Program Penataan Organisasi	Rp2.844.564.298,00	Biro Organisasi
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp438.473.934.797,00	Semua Biro

Biro Organisasi melaksanakan Program Penataan Organisasi dengan pendanaan sebesar Rp.2.844.564.298 (dua milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus Sembilan puluh delapan rupiah).

8. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi yang dilakukan oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dalam memberikan banyak manfaat dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Beberapa pemanfaatan teknologi oleh :

- Sidebar Mobile Apps* adalah aplikasi tata kelola persuratan berbasis elektronik yang efektif, digunakan oleh seluruh jenjang aparatur di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat berbasis web dan apps yang tersedia di *playstore* maupun *appstore*.
- TRK (Aplikasi e-kinerja)* adalah aplikasi e kinerja ASN sesuai dengan capaian kinerja individu sesuai dengan Capaian Kinerja Perangkat Daerah masing masing ASN
- Aplikasi KMOB* adalah aplikasi kehadiran mobile
- Aplikasi Surabi (Sistem Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Terintegrasi) merupakan system informasi untuk mempermudah pelaksanaan evaluasi implementasi RB yang dilengkapi dengan petunjuk teknis.
- Portal Jabarprov adalah Portal yang menyediakan informasi resmi, akses ke berbagai layanan publik dan tempat menyampaikan aspirasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- Japati (Jawa Barat Managemen Kinerja Instansi Pemerintahan Terintegrasi) merupakan aplikasi e-sakip yang menyediakan informasi

manajemen kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sesuai dengan implementasi pengelolaan kinerja organisasi, cascading kinerja dilakukan secara berjenjang dengan masing masing pengampu dari level ultimate outcome, intermediate outcome, immediate outcome sampai dengan level output. Japati bisa diakses bukan hanya oleh perangkat daerah tetapi juga masyarakat agar dapat memberikan masukan terhadap kinerja pemerintah.

Dengan pemanfaatan teknologi informasi tersebut, Biro Organisasi Setda provinsi Jawa Barat dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan publik di Provinsi Jawa Barat.

BAB II

PENUTUP

Demikian Laporan Studi Lapangan ini disusun, semoga mampu memberikan inspirasi bagi peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023. Dengan kegiatan ini, peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III BPSDMD Provinsi Sumsel Tahun 2023 sebagai *project leader* telah mendapatkan input berupa serangkaian pengalaman belajar sekaligus dapat melakukan identifikasi program unggulan dan memahami *best practise* dalam pengelolaan program organisasi lokus yang dikunjungi, yaitu Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Hasil identifikasi dan pemahaman *best practise* yang telah di dapatkan dari lokus yang dikunjungi diharapkan dapat bermanfaat untuk digunakan sebagai sumber inspirasi ataupun bahan perbandingan dalam menyempurnakan dan melaksanakan proyek perubahan instansional secara lebih efektif dan efesien.

Demikian laporan ini disusun guna melengkapi persyaratan dan kelengkapan dalam mengikuti seluruh kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. 1950. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 2020. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 2021. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Renstra Setda Pemprov Jawa Barat tahun 2024-2026
- Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 2022. Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Waktu Kerja Dan Lokasi Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- Republik Indonesia. 2023. Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2023 Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah Pegawai
- Pemerintah Provinsi Jawa barat. 2021. Peraturan Gubernur Nomor 181 Tahun 2021 Tentang Manajemen Kinerja Yang Menerapkan Pola Tim Kerja Yang Bertanggung Jawab Langsung Pada Pimpinan Level II
- Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 2016. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.964- Inspt/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 2022. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 98 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 155 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 98 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

LAMPIRAN

PESERTA PKA TIBA DI GEDUNG SATE



PENERIMAAN PESERTA PKA DI RUANG PAPANDAYAN



AUDIENSI PESERTA PKA DI BIRO ORGANISASI



PENYERAHAN CINDERAMATA



DOKUMENTASI RAMAH TAMAH



PENYUSUNAN LAPORAN STUDI LAPANGAN KINERJA ORGANISASI



Preview Aplikasi K-MOB

(kmob.jabarprov.go.id)

The screenshot shows the K-MOB application dashboard. At the top, there is a navigation bar with the K-MOB logo, a 'Home' link, and a 'Privacy & policy' link. The main heading reads 'Sistem Monitoring Kehadiran ASN Pemprov Jawa Barat'. Below this is a 'Login Dashboard Now' button. The dashboard itself has a green header with 'K-MOB' and 'PEMROV JAWA BARAT'. On the left is a sidebar menu with options like 'Dashboard', 'Laporan (Pemrov)', 'Lap Utama Harian', 'Statistik Bulanan', 'Laporan Covid 19', 'Lap Pengguna K-MOB', and 'MONITORING OPD'. The main content area displays several key metrics: 'Kehadiran' at 0.22% (75), 'Alpa' at 99.77% (34,351), 'Cutl' at 0.01% (4), and 'Total Pegawai' at 34,430. There is also a progress bar for 'KEHADIRAN BERDASARKAN SKEMA KERJA' showing 80.00% and 1733%.

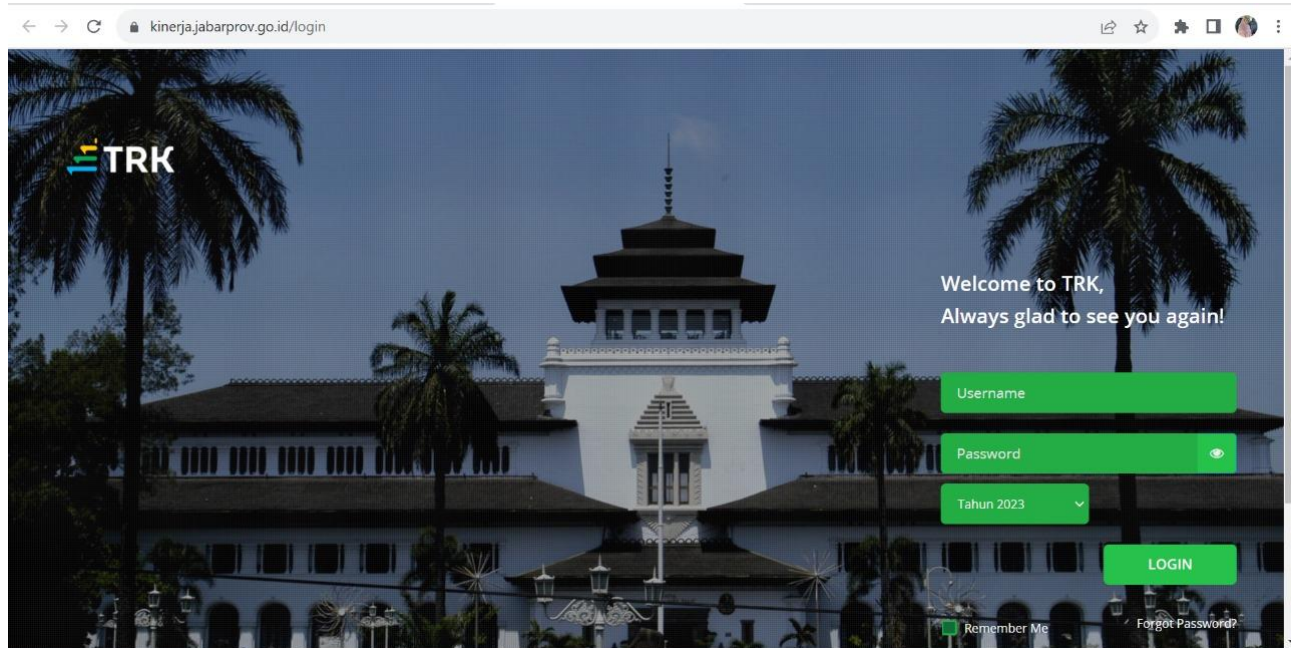
Preview Aplikasi SIDE BAR

(sidebar.jabarprov.go.id)

The screenshot shows the login page of the SIDE BAR application. The header includes the 'SIDEBAR' logo and navigation links for 'Dashboard OPD', 'Fitur Utama', 'Tutorial', 'Pusat Bantuan', and a 'Login' button. The main content area has a blue background with the 'SIDEBAR' title and a description: 'Sistem Informasi Dokumen Elektronik Jawa Barat atau SIDEBAR merupakan Aplikasi E-Office yang hadir untuk memberikan kemudahan bagi seluruh ASN dalam memproses, menindaklanjuti, dan mengarsipkan Naskah Dinas Elektronik di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat secara digital, praktis, dan aman. SIDEBAR "Dokumen Aman Dalam Genggaman"'. Below this is a section for downloading the application from Google Play and the App Store. On the right, there is a login form with fields for 'Username', 'Password', and 'Captcha Kode', along with a 'Login' button and a link for 'atau' (or).

Preview Aplikasi TRK

(kinerja.jabarprov.go.id)



← → ↻ kinerja.jabarprov.go.id/login ☆ ⚙ □ 👤 ⋮

TRK

Welcome to TRK,
Always glad to see you again!

Username

Password

Tahun 2023

LOGIN

☐ Remember Me [Forgot Password?](#)

Preview Aplikasi JAPATI

(kinerja.jabarprov.go.id)



Preview Portal JABARPROV.GO.ID

(jabarprov.go.id)





Laporan Studi Lapangan Kinerja Organisasi

**Biro Organisasi Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Barat**

DISUSUN OLEH :

1. KETUA : Dr. DIAN ARYOGO SUTOYO, M. Psi
2. WAKIL KETUA : SEPTA MARUS EKA PUTRA, S.H, M.H
3. SEKRETARIS : LYDIA GUSMALITA, S.STPM.Ec. Dev
4. ANGGOTA :
 1. ARYA DEWANTARAS.E,M.Si
 2. IMAM ILHAM, S.H, M.H
 3. ALEXANDER, S.IP.M.Si
 4. JUFRIANSYAH, S.STPM.Si
 5. DERRY ARIADI, S.H, M.H
 6. FETRI ASWANTI, S.TM.Si, M.
 7. ARDHILES P. RAJA SIAHAAN, S.T
 8. HENDRI WARDISON, S.PM.Si
 9. PUTRI DAMAYANTI,S.Psi, M.M
 10. SRI ULFATI, S.H
 11. BRAM ABRAHAM, SE
 12. NUR AINUN TANJUNG, S.Ag



Tugas dan Fungsi Biro Organisasi

Tugas

menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administrative dalam bidang organisasi, meliputi kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja serta tatalaksana yang menjadi kewenangan Provinsi

Fungsi

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan umum, koordinasi administratif, supervisi, pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif dalam bidang organisasi;
- b. penyelenggaraan administrasi Biro Organisasi;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Biro Organisasi; dan
- d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Empat Sasaran Implementasi Kebijakan

01

Terwujudnya Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Smart, Bersih, Dan Akuntabel

02

Meningkatnya Keimanan Dan Kerukunan Umat Beragama Dalam Kerangka Demokrasi '

03

Terbentuknya Daerah Otonomi Baru Untuk Pemerataan Pembangunan

04

Terwujudnya Kolaborasi Antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota Dan Pihak Lainnya Dalam Pembangunan Yang Sinergis Dan Integratif '

Tabel 1.1
Capaian Aspek/Indikator Kinerja Biro Organisasi SETDA PEMPROV JABAR

[illegible]

No	Aspek/Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Provinsi Jawa Barat											
6	Nilai Manajemen Perubahan	Nilai	3.69	3.69	3.45	3.55	3.65	3.25	3.25	3.97	4.92*	
7	Nilai Penataan dan Penguatan Organisasi	Nilai	N/A	N/A	3.94	4.06	4.18	N/A	N/A	3.75	7.09*	

Key Success Factors

01

Komitmen tinggi
dari seluruh
Stakeholder

03

Pembangunan Jejaring,
Kerja dan Kolaborasi
Pemangku Kepentingan

02

Kepemimpinan
Transformasional
dan Inovatif

04

Pemanfaatan Teknologi
Digital



Lessons Learned Hasil STULA

01

Planning and budgeting

Melalui pelaksanaan
“Program Penataan
Organisasi”

02

Pemanfaatan Teknologi Informasi

- ✓ Sidebar Mobile Apps (tatakelola persuratan)
- ✓ TRK (Aplikasi E- Kinerja)
- ✓ KMOB (aplikasi Kehadiran Mobile)
- ✓ SURABI (Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi)
- ✓ Portal JABARPROV
- ✓ JAPATI (Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah Terintegrasi)

Lessons Learned Hasil STULA (lanjutan)

03

Sistem Kerja Aparatur

- ✓ Tim Internal Bidang
- ✓ Tim Agile antar Bidang
- ✓ Tim Agile Lintas Perangkat Daerah
- ✓ Tim Agile Lintas Instansi

04

Manajemen Kinerja

- ✓ Manajemen Proses Bisnis
- ✓ Membangun Arsitektur Kinerja
- ✓ Menyusun Cascading kinerja
- ✓ Menyusun Crosscutting kinerja lintas

05

Manajemen Resiko

- Membuat komite manajemen resiko :
- ✓ Komite Eksekutif
 - ✓ Komite Pelaksana
 - ✓ Biro/bagian



Lesson Learned Hasil lanjutan

06

Peran Kepemimpinan

- ✓ Mendorong Kreativitas dan budaya inovasi
- ✓ Menciptakan lingkungan kerja yang dinamis
- ✓ Mekanisme kerja dinamis
- ✓ Mengembangkan jaringan dan kolaborasi

07

Inovasi Pelayanan

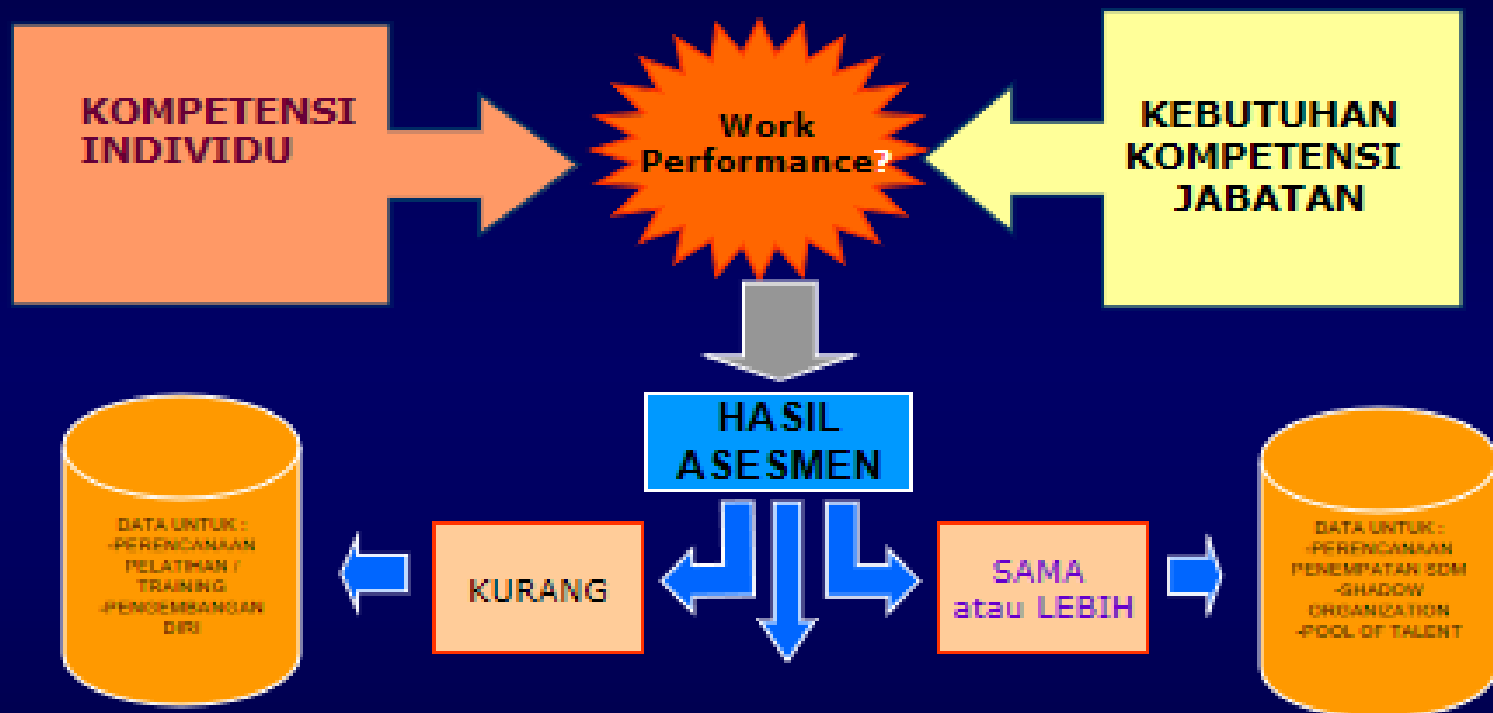
- ✓ Sidebar Mobile Apps
- ✓ Tunjangan Remunerasi Kinerja (TRK)
- ✓ KMOB (Aplikasi Kehadiran Mobile)
- ✓ Aplikasi Surabi (Sistem pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Terintegrasi)
- ✓ Portal Jabar Prov
- ✓ JAPATI (Jawa Barat Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah Terintegrasi)

08

Kompetensi dan Pemberdayaan SDM

- ✓ Penyederhanaan Birokrasi
- ✓ Penyederhaan Struktur Organisasi dan tata kerja
- ✓ Pendefinisian Peran Perangkat Daerah
- ✓ Manajemen Talenta dengan melakukan inovasi SIM Jawara

IMPLEMENTASI ASESMEN POTENSI & KOMPETENSI SDM

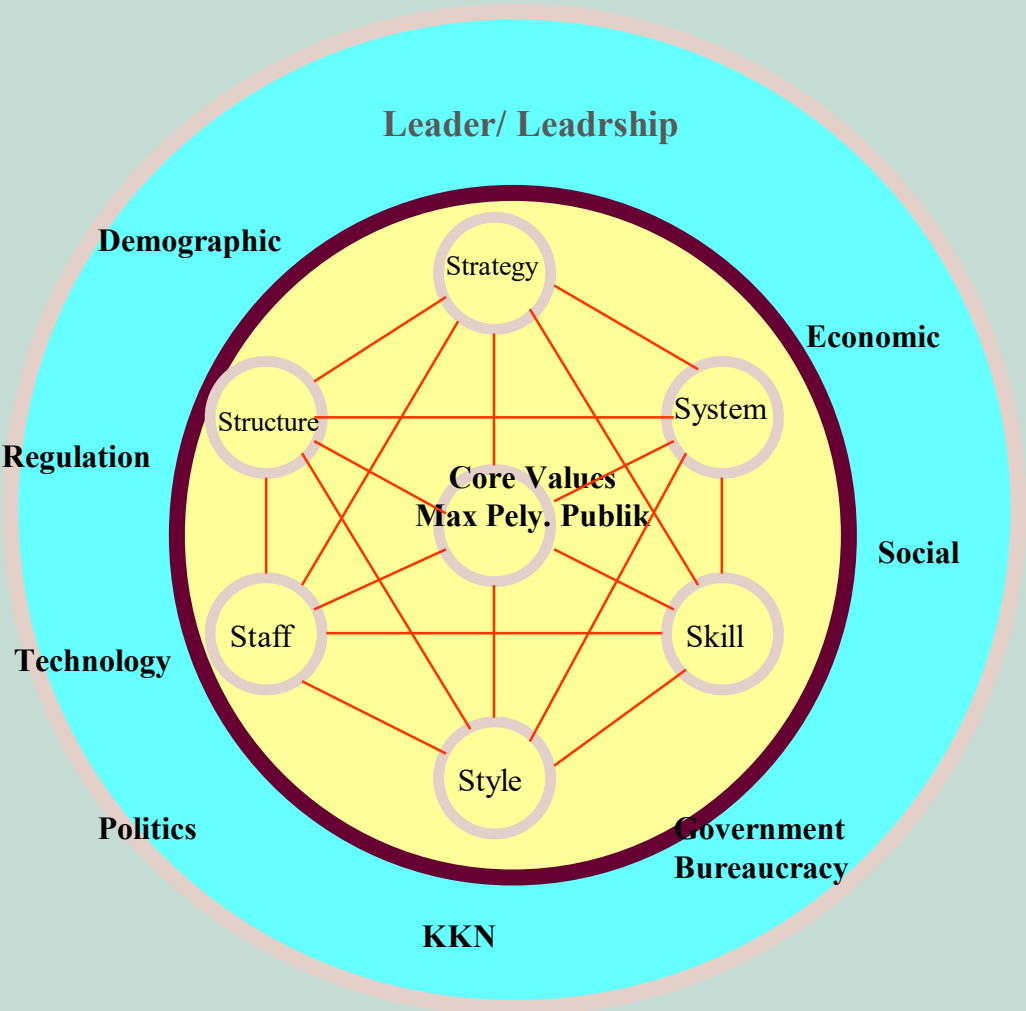


MODEL MANAJEMEN TALENTA



**DISRUPTION
ERA**

Volatile, Uncertain,
Complex, Ambiguous



FINAL LEASON LEARN COMPARATIF STUDY ORGANISASI (JAWA BARAT & SUMATERA SELATAN)

Personal

- ✓ Resiliensi
- ✓ Responsif dan terbuka terhadap perubahan
- ✓ Inovatif
- ✓ Selalu berusaha mengembangkan diri
- ✓ Memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi

Pengelola SDM

- ✓ Merekrut & mengidentifikasi potensi Talent
- ✓ Membangun keterampilan pegawai
- ✓ Menyusun program pengembangan pegawai
- ✓ Memberikan informasi karier yang jelas

Pimpinan

- ✓ Memperkuat komunikasi dengan pegawai, menjadi role model
- ✓ Memberi spirit
- ✓ Memberikan arahan yang jelas
- ✓ Memberi apresiasi kepada pegawai

Organisasi

- ✓ Menarik Talent terbaik
- ✓ Adanya pilihan kerja fleksibel
- ✓ Menyediakan lingkungan kerja yang adil, kompetitif, dan transparan

ORGANIZASIONAL BEHAVIOR



EVALUATION

INPUT:

Raw Input, Instrumental input

Benefit, Impact:

1. Bagi Masyarakat
2. Bagi Daerah: Capaian RB Tematik, IKD

Outcome:

1. Kemanfaatan bagi jabatan (talent pool/management)
2. Kemanfaatan bagi instansi (Kinerja Organisasi, IKU)

Output:

Lulusan, Capaian Tujuan Pembelajaran



Perubahan sistem organisasi dan tata kerja di Pemprov Jawa Barat berhasil dengan baik karena mendapatkan dukungan penuh peran kepemimpinan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat

“

**DIGITALISASI
ADALAH TOOLS,
BUKAN TUJUAN.**

**KEPUASAAN PUBLIK
ADALAH TUJUAN
SEBENARNYA.**

”

